BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keberhasilan penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, dapat disimpulkan bahwa penggabungan organisasi telah memberikan sejumlah dampak positif, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek.

1. Sumber Daya Manusia. Penggabungan mendorong interaksi dan pertukaran pengetahuan antarpegawai serta menunjukkan peningkatan kehadiran pegawai. Namun, pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan masih perlu ditingkatkan agar kemampuan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pembagian tugas setelah penggabungan.
2. Sarana dan Prasarana. Penggabungan memungkinkan pemanfaatan aset dari kedua organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, masih terdapat peralatan yang mengalami kerusakan dan keterbatasan ruang kerja serta penyimpanan dokumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

integrasi aset belum sepenuhnya diikuti dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai.

3. Teknologi Informasi. Pemanfaatan aplikasi seperti SRIKANDI dan SIPD membantu mempercepat pekerjaan, mempermudah koordinasi, serta mendukung administrasi pemerintahan. Pengelolaan website dan media sosial juga semakin berkembang. Akan tetapi, akses layanan digital belum sepenuhnya optimal karena sebagian pelayanan masih dilakukan secara manual dan jaringan internet masih mengalami gangguan.
4. Budaya Organisasi. Penggabungan telah mendorong penyesuaian pembagian tugas dan pelaksanaan kegiatan bersama, serta mempertahankan orientasi pelayanan yang ramah dan responsif. Namun, inovasi pelayanan, keberlanjutan penggunaan aplikasi SILAPOR, dan kedisiplinan pegawai masih memerlukan perhatian agar terbentuk budaya organisasi yang terintegrasi dan berorientasi pada kinerja.
5. Lingkungan Organisasi. Penggabungan menunjukkan perkembangan positif dalam interaksi sosial antarpegawai dan dukungan terhadap keamanan lingkungan kerja. Namun, penyesuaian administrasi kepegawaian, proses integrasi organisasi, serta keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

Secara keseluruhan, keberhasilan penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya optimal. Penggabungan telah menyatukan struktur organisasi dan mendukung beberapa aspek pelaksanaan tugas, tetapi belum secara otomatis menyelesaikan persoalan kompetensi pegawai, fasilitas kerja, aksesibilitas teknologi informasi, inovasi, kedisiplinan, administrasi kepegawaian, dan dukungan anggaran. Dengan demikian, keberhasilan penggabungan perlu dinilai tidak hanya dari terbentuknya organisasi baru, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan sumber daya dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas serta pelayanan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keberhasilan penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. **Sumber Daya Manusia (SDM).** DLHK Provinsi Sulawesi Barat perlu meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan kompetensi pegawai agar integrasi sumber

daya manusia setelah penggabungan dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi.

2. **Sarana dan Prasarana.** DLHK Provinsi Sulawesi Barat perlu melakukan inventarisasi dan evaluasi aset secara berkala, memperbaiki atau mengganti peralatan yang rusak, serta menata ruang kerja dan penyimpanan dokumen. Langkah ini diperlukan agar sarana dan prasarana yang berasal dari kedua organisasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pelaksanaan tugas.

3. **Teknologi Informasi.** DLHK Provinsi Sulawesi Barat perlu mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pemerintahan, meningkatkan kestabilan jaringan internet, serta mengembangkan akses layanan informasi dan pengaduan masyarakat secara digital. Evaluasi terhadap aplikasi yang telah digunakan juga diperlukan agar teknologi informasi tidak hanya mempercepat pekerjaan internal, tetapi turut meningkatkan kemudahan akses pelayanan masyarakat.

4. **Budaya Organisasi.** DLHK Provinsi Sulawesi Barat perlu memperkuat budaya kerja yang kolaboratif, disiplin, berintegritas, berorientasi pada pelayanan, dan mendorong inovasi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap keberlanjutan penggunaan aplikasi SILAPOR dan mekanisme pengaduan masyarakat agar

inovasi pelayanan dapat berjalan secara efektif setelah penggabungan organisasi.

5. **Lingkungan Organisasi.** Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DLHK perlu memperkuat koordinasi dalam penyesuaian administrasi kepegawaian, membangun integrasi sosial antarpegawai, menjaga keamanan lingkungan kerja, serta menyesuaikan dukungan anggaran dengan kebutuhan dan prioritas program. Dengan demikian, lingkungan organisasi yang kondusif dapat mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan DLHK secara berkelanjutan.

C. Produk Tesis

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian mengenai faktor-faktor keberhasilan pasca penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, peneliti menghasilkan produk tesis berupa *Policy Brief* dengan judul “Penguatan Faktor-Faktor Keberhasilan Penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.” Policy Brief ini disusun sebagai bentuk rekomendasi kebijakan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan yang ditemukan pada proses penggabungan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan telah menghasilkan beberapa perubahan positif, terutama dalam penyatuan organisasi, pembagian tugas,

pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan, dan keamanan lingkungan kerja. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal, antara lain pengembangan sumber daya manusia, aksesibilitas teknologi informasi, orientasi inovasi, integrasi sosial budaya, penyesuaian administrasi kepegawaian, serta keterbatasan anggaran.

Policy Brief ini ditujukan terutama kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penguatan organisasi pasca penggabungan dan juga *Policy Brief* ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat keberhasilan organisasi DLHK pasca penggabungan. *Policy Brief* tidak dimaksudkan untuk menggantikan kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi memberikan alternatif rekomendasi berdasarkan temuan empiris penelitian sehingga proses penyesuaian organisasi dapat dilakukan secara lebih terarah, bertahap, dan berkelanjutan.